

Analisis Pasar Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Ekonomi Daerah

(Studi Pada Pasar Manis Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)

Kanaya Datta Sorra Effendi¹, Evania Puji Ayu Lestari², Dafit Saputri³, Nashwa Fakhira Achmad⁴, Shofia Nur Alifah⁵, Siti Maghfiroh⁶

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jalan Ahmad Yani No.40 A, Purwokerto, Indonesia

* Corresponding Author. Email: 234110201155@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran pasar rakyat sebagai implementasi nyata demokrasi ekonomi dalam konteks lokal, khususnya di Pasar Manis Purwokerto Barat. Pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, penelitian ini menggali dinamika pengelolaan pasar rakyat, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar rakyat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi melalui partisipasi masyarakat, keterlibatan pedagang dalam pengambilan keputusan, serta distribusi ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, persaingan dengan pasar modern, serta rendahnya literasi digital pedagang, pasar rakyat tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan lokal dan menjaga keberlanjutan ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan pemerintah, pengelola, dan masyarakat, pasar rakyat berpotensi berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Demokrasi Ekonomi; Ekonomi Kerakyatan; Pasar Rakyat; Pemberdayaan Masyarakat

Analysis of People's Markets as an Implementation of Regional Economic Democracy

(A Study of the Manis Market in West Purwokerto, Banyumas Regency)

Abstract: This study analyzes the role of traditional markets (pasar rakyat) as a concrete implementation of economic democracy in the local context, particularly at Pasar Manis, Purwokerto Barat. Traditional markets function not only as centers of economic transactions but also as spaces for social interaction, cultural exchange, and community empowerment. Using a qualitative approach with descriptive analysis, this research explores the dynamics of traditional market management, the challenges faced, and their contribution to economic equity and the strengthening of micro, small, and medium enterprises. The findings show that traditional markets embody the principles of economic democracy through community participation, traders' involvement in decision-making, and a fairer and more inclusive distribution of economic opportunities. Despite facing obstacles such as limited facilities, competition with modern markets, and low digital literacy among traders, traditional markets remain an essential instrument in supporting local welfare and sustaining the people's economy. With support from the government, managers, and the community, traditional markets have the potential to grow into centers of inclusive, equitable, and sustainable economic empowerment.

Keywords: Economic Democracy; People's Economy; Traditional Market; Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pasar rakyat adalah salah satu pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa. Sebagai dasar ekonomi koperasi, pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat belanja dan jual beli, tetapi juga sebagai tempat pertemuan sosial dan ekonomi yang melibatkan para pedagang, petani, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Konsep pasar rakyat memposisikan masyarakat sebagai bagian utama dalam perekonomian dengan ciri khasnya adalah partisipasi masyarakat yang aktif serta pengelolaan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan.¹

Dalam konteks demokrasi ekonomi, pasar rakyat mencerminkan beberapa prinsip seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, kemerdekaan para pedagang dalam menjalankan usaha, serta adanya akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Dengan demikian, pasar rakyat menjadi alat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa, memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan, pembuatan lapangan kerja, dan pengembangan usaha lokal. Demokrasi ekonomi dalam pasar rakyat menegaskan prinsip keadilan sosial dan keterlibatan seluruh warga dalam perekonomian yang adil dan inklusif.

Penerapan pasar rakyat di desa memiliki berbagai tantangan, seperti pengelolaan pasar, tata kelola yang efektif, infrastruktur yang memadai, serta terjadinya konflik antarpedagang. Namun, dengan peran yang aktif dari pemerintah desa, lembaga pengelola, dan masyarakat, solusi inovatif seperti digitalisasi pengelolaan dan peningkatan fasilitas dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pasar rakyat yang dikelola secara adil dan inklusif mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta memperkaya struktur ekonomi lokal. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pasar rakyat sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang adil dan inklusif. Pemerintah berperan sebagai pihak yang mengatur, membantu, dan memberi motivasi dengan menyediakan aturan, fasilitas, serta bantuan kepada para pedagang. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pasar menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pasar yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pasar rakyat menjadi tempat aktualisasi ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan adil.²

KAJIAN TEORI

Pasar rakyat atau pasar tradisional merupakan salah satu bentuk nyata implementasi demokrasi ekonomi. Pasar ini berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, sekaligus simbol pemberdayaan masyarakat kecil. Sebagai contoh spesifik, Pasar Manis terletak di Kelurahan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang strategis, berada di pusat kota Purwokerto dan mudah diakses melalui Jalan Pasar Manis, dengan luas sekitar 2,5 hektar. Sebagai pusat perekonomian lokal, Pasar Manis menjadi wadah bagi pedagang kecil, petani, dan masyarakat sekitar untuk menjual produk lokal seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan kerajinan tangan, sehingga mendukung prinsip demokrasi ekonomi melalui akses yang inklusif dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Demokrasi ekonomi, dalam konteks Pasar Manis, merujuk pada sistem ekonomi yang menekankan kesetaraan akses, partisipasi aktif masyarakat, dan distribusi kekayaan yang adil. Berdasarkan konsep demokrasi ekonomi yang dikembangkan oleh para ahli seperti John Rawls dan Amartya Sen, prinsip-prinsipnya meliputi: (1) partisipasi ekonomi yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi; (2) kontrol kolektif atas sumber daya ekonomi; dan (3) pemberdayaan individu dan kelompok kecil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di Pasar Manis, demokrasi ekonomi tercermin melalui mekanisme tawar-menawar yang adil, di mana pedagang kecil dan pembeli dari berbagai strata sosial dapat berinteraksi secara langsung, meminimalkan dominasi kapital besar. Hal ini berbeda dengan pasar modern yang sering kali dikendalikan oleh korporasi, sehingga Pasar Manis berperan sebagai ruang untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan ketahanan lokal di tengah globalisasi.

Menurut (Ketjil et al. 2022), pasar rakyat memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai instrumen distribusi ekonomi yang inklusif, (2) sebagai sarana pemberdayaan masyarakat kecil untuk meningkatkan pendapatan, dan (3) sebagai wadah interaksi sosial dan budaya. Selain itu, pasar rakyat juga memperkuat identitas lokal karena menjadi ruang pelestarian kearifan tradisional. Barang-barang yang dijual biasanya merupakan produk lokal, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, serta kebutuhan pokok yang relevan dengan masyarakat setempat.

Hal ini menjadikan pasar rakyat tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai pusat budaya.

Menurut Damsar (2005), pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat distribusi barang, sarana interaksi sosial, dan penggerak perekonomian. Pasar tradisional memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki pasar modern, seperti harga yang lebih murah, adanya tawar-menawar, dan kedekatan sosial antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, kondisi fisik pasar tradisional yang kurang memadai (kumuh, kotor, dan becek) sering kali menurunkan minat konsumen. Oleh karena itu, revitalisasi pasar tradisional penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus mempertahankan perannya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, penelitian Mohamad Iman A. Ketjil menyoroti pentingnya pasar rakyat dalam memperkuat demokrasi ekonomi, seperti yang terlihat pada Pasar Tradisional Setia Budi di Bolang Itang Timur. Pasar ini memberikan akses bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil untuk memasarkan hasil produksi mereka langsung ke konsumen dengan harga bersaing, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pasar rakyat berfungsi sebagai instrumen penting dalam pemerataan akses ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan menyediakan peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga simbol keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di berbagai lapisan sosial (Ketjil et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pasar rakyat, khususnya Pasar Manis di Purwokerto Barat, dapat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Pasar rakyat, sebagai pusat perekonomian lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang adil dan inklusif. Melalui analisis ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana pasar rakyat mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata, memberdayakan pedagang kecil, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap produk lokal. Kemudian bertujuan untuk menilai peran pasar rakyat dalam menciptakan peluang ekonomi yang setara di tengah tantangan persaingan dengan pasar modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang menggabungkan data primer dan sekunder untuk menggali peran pasar rakyat dalam implementasi demokrasi ekonomi di Pasar Manis, Purwokerto Barat. Data primer akan dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola pasar, serta masyarakat lokal, dan dokumentasi yang terkait dengan kegiatan pasar. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas yang terjadi di Pasar Manis untuk memahami interaksi sosial dan ekonomi yang terjalin di pasar tersebut. Sementara itu, data sekunder akan dikumpulkan melalui kajian pustaka dari jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas pasar rakyat, demokrasi ekonomi, dan pengelolaan pasar tradisional. Proses ini akan dilakukan dalam beberapa tahap: (a) Reduksi data, di mana data yang terkumpul akan disaring untuk menemukan informasi yang relevan; (b) Penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel yang mudah dipahami, dan (c) Penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan pemahaman mengenai peran pasar rakyat dalam mendukung implementasi demokrasi ekonomi.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pasar rakyat dapat berperan dalam pemerataan ekonomi, pemberdayaan pedagang kecil, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar modern. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan pasar rakyat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat peran pasar rakyat dalam ekonomi lokal.

¹ Sudrajat, D. W., Nurwanda, A., & Budiawan, A., "Implementasi Peraturan Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kabupaten Ciamis," *Jurnal OTONOMI* 1, no. 2 (2024): 313-324.

² Avedish, D., Nursasi, A., Luqman, M., & Nada, Q., "Peran Pasar Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Ekonomi



(Studi Pada Pasar Kober Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)," Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi 2, no. 1 (2025): 245-254.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pasar Rakyat dan Karakteristiknya sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Pasar rakyat merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian masyarakat desa karena menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada asas kekeluargaan tradisi, serta kebutuhan sehari-hari. Pasar rakyat pada dasarnya berbeda dengan pusat perbelanjaan modern, baik dari segi sistem maupun budaya yang melingkupinya. Konsep pasar rakyat tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli, tetapi juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan bahkan politik. Hal ini terlihat dari perannya sebagai ruang interaksi sosial masyarakat desa, tempat bertukar informasi, hingga sarana mempererat solidaritas komunitas. Keberadaan pasar rakyat juga mencerminkan kearifan lokal yang terus terjaga di tengah modernisasi, karena pola hubungan antara pedagang dan pembeli didasarkan pada prinsip saling percaya, tawar-menawar, dan keadilan yang khas dalam sistem ekonomi rakyat.³

Karakteristik pasar rakyat terletak pada keterbukaannya terhadap semua lapisan masyarakat desa tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. Barang yang diperdagangkan umumnya berupa kebutuhan pokok sehari-hari, hasil pertanian, ternak, dan produk lokal lainnya yang diproduksi langsung oleh masyarakat desa. Harga di pasar rakyat relatif lebih terjangkau karena tidak terlalu dipengaruhi oleh sistem distribusi panjang seperti di pasar modern. Selain itu, proses tawar-menawar menjadi ciri khas untuk yang memperlihatkan fleksibilitas harga dan kedekatan emosional antara pedagang dan pembeli. Pedagang di pasar rakyat sebagian besar adalah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjalankan usaha berbasis keluarga. Dengan demikian, pasar rakyat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat desa serta memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komunitas⁴. Pasar rakyat berfungsi sebagai: (a) Distribusi barang kebutuhan pokok. Pasar rakyat menjadi sarana distribusi hasil pertanian, peternakan, maupun kerajinan lokal. (b) Pusat pembentukan harga lokal. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi penawaran dan permintaan, bukan oleh monopoli tertentu. (c) Sumber penghidupan masyarakat kecil. Pasar memberi kesempatan usaha bagi pedagang kecil, petani, dan pengrajin. (d) Pusat interaksi sosial-budaya. Pasar menjadi ajang pertemuan, tukar informasi, hingga menjaga tradisi lokal. (e) Pendukung pembangunan desa. Melalui retribusi dan aktivitas ekonomi, pasar turut menyumbang bagi kas desa dan kesejahteraan umum.

Tantangan Pasar Rakyat yaitu berupa persaingan dengan pasar modern, keterbatasan fasilitas, serta masalah manajemen pengelolaan. Oleh karena itu, revitalisasi pasar rakyat menjadi program penting pemerintah agar pasar tetap eksis sekaligus nyaman bagi masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi yang Ditetapkan di Pasar Rakyat

Demokrasi ekonomi adalah sistem yang menawarkan kesempatan setara bagi semua individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan ekonomidan mendapatkan hasil dari kegiatan ekonomi yang terjadi. Menurut Mubyarto, konsep ini mencakup beberapa aspek, seperti: (a)

³ Avedish, D., Nursasi, A., & Luqman, M., "Peran Pasar Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Ekonomi (Studi pada Pasar Kober Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)," Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (2024).

⁴ Savanna Fransisca S. Manuel, "Penerapan Konsep dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Pasar Desa Cipeundeuy," Jurnal PGs Undip (2024)

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi pada tingkat nasional, regional, serta lokal. (b) Pemberdayaan ekonomi komunitas dengan cara meningkatkan kapasitas dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia. (c) Peran pemerintah yang lebih kuat dalam memberikan dukungan dan perlindungan terhadap sektor ekonomi mikro dan kecil, melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan bisnis. (d) Mendorong perkembangan koperasi dan usaha sosial yang berlandaskan prinsip keadilan serta demokrasi. (e) Menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

Prinsip demokrasi ekonomi berakar dari Pancasila dan UUD 1945, di mana sistem ekonomi Indonesia bertujuan untuk merealisasikan ajaran dari sila-sila Pancasila serta Pasal 33 UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, demokrasi ekonomi juga merupakan sebuah kegiatan bisnis yang mencakup nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan, serta manfaat bagi umat Islam di Indonesia. Ide tentang demokrasi ekonomi diatur secara jelas dalam konstitusi sebagai undang-undang tertinggi di Indonesia. UUD 1945 tidak hanya mengandung gagasan tentang demokrasi politik tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa, dalam konteks kekuasaan tertinggi di negara ini, rakyat memiliki kontrol di semua bidang. Semua sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang merdeka.⁶

Demokrasi ekonomi berupaya menghindari terbentuknya sistem ekonomi liberal, etatisme, serta konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. Sistem ekonomi liberal harus dihindari karena akan menyebabkan eksploitasi dan penindasan terhadap sesama manusia. Model etatisme, yang mana ekonomi dirampas oleh negara, juga harus dihindari, mengingat etatisme bisa membunuh usaha-usaha di luar sektor publik seperti bisnis swasta, koperasi, dan usaha kecil.⁷ Konsep demokrasi dari pasar rakyat adalah pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan sistem pasar untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat menjadi pusat dalam proses pengambilan keputusan politik dan keputusan ekonomi, sehingga kebijakan yang dianut lebih mendukung kepentingan bersama. Pasar rakyat yang mendukung keadilan sosial serta kesejahteraan kolektif adalah cerminan dari demokrasi ekonomi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam aktivitas ekonomi dengan penekanan pada partisipasi masyarakat.⁸ Melalui pasar rakyat, demokrasi ekonomi memfasilitasi keterlibatan sosial sekaligus menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pasar rakyat hadir sebagai contoh nyata dari ekonomi yang berlandaskan pada kepentingan rakyat selaras dengan prinsip Pancasila.

⁵ Avedish, D., Nursasi, A., Luqman, M., Nada, Q., & Maghfiroh, S., "Peran Pasar Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Ekonomi (Studi Pada Pasar Kober Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (2025): 245-254.

⁶ Fariz, T. A., Nugraha, G., Alfauzan, M. R., & Sumaryono, D. M., "Demokrasi Pancasila dalam Isu Ekonomi," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 737-742

⁷ Syafruddin Karimi, S. E., *Manifesto Demokrasi Ekonomi: Sistem Pasar dan Keadilan Sosial* (2010).

⁸ Seff, S. M., "Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah," *Risalah Hukum* (2010): 13-25.

3. Hubungan Antara Pasar Rakyat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasar rakyat merupakan salah satu bentuk pasar tradisional yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan budaya yang memperkuat jaringan ekonomi lokal. Dengan demikian, pasar rakyat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pasar rakyat dapat dilihat dari bagaimana pasar ini menyediakan akses yang lebih mudah dan murah bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan produk mereka. Berbeda dengan pasar modern yang cenderung memerlukan modal besar dan persyaratan administratif yang ketat, pasar rakyat memungkinkan pelaku usaha dengan modal terbatas untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pasar.⁹

Lebih jauh, pasar rakyat dapat menjadi pusat pengembangan produk lokal yang khas dan bernilai budaya tinggi. Produk-produk seperti kerajinan tangan, makanan tradisional, dan hasil pertanian lokal dapat dipasarkan secara langsung kepada konsumen.¹⁰ Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas ekonomi masyarakat setempat. Namun, untuk memaksimalkan peran pasar rakyat dalam pemberdayaan ekonomi, diperlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Misalnya, penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan bagi pedagang, serta regulasi yang mendukung keberlangsungan pasar rakyat. Dukungan ini akan meningkatkan daya saing pasar rakyat dan memperkuat posisi pelaku usaha kecil dalam rantai nilai ekonomi. Selain itu, integrasi pasar rakyat dengan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini. Dengan memanfaatkan platform digital, pelaku usaha di pasar rakyat dapat memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendapatkan akses informasi yang lebih baik. Transformasi digital ini membuka peluang baru bagi pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹¹

Studi empiris menunjukkan bahwa pasar rakyat yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Nugroho (2020) menemukan bahwa pasar rakyat di daerah Jawa Tengah berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 30% dalam kurun waktu lima tahun. Temuan ini menegaskan pentingnya pasar rakyat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.¹²

⁹ Sari, D. P., & Nugroho, Y., "Peran Pasar Rakyat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 18, no. 2 (2020): 145-160.

¹⁰ Maharani, Rieska, et al., *Pemberdayaan Ekonomi Beserta Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Pangan Melalui Kampung Hidroponik Di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Lokal* (Surabaya: CV. AA. RIZKY, 2021).

¹¹ Putri, R. A., & Wibowo, A., "Pengaruh Pasar Tradisional terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 21, no. 1 (2019): 75-88.

¹² Kusuma, I. W., & Lestari, S., "Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Kreatif* 15, no. 1 (2022): 50-65.



Namun, tantangan seperti persaingan dengan pasar modern, keterbatasan modal, dan kurangnya akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha di pasar rakyat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan pasar rakyat dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, hubungan antara pasar rakyat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat erat dan saling menguntungkan. Pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan yang memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya lokal. Dengan dukungan yang tepat, pasar rakyat dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹³

4. Implementasi Pasar Rakyat dalam Konteks Daerah termasuk Tantangan dan Solusinya

Pasar rakyat di desa memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat. Implementasi pasar rakyat biasanya dilakukan melalui pembangunan atau revitalisasi pasar desa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMDes, atau koperasi pedagang. Tahapan implementasi meliputi perencanaan lokasi yang strategis, penyediaan sarana prasarana dasar seperti lapak, sanitasi, drainase, hingga akses jalan, serta penetapan aturan retribusi yang jelas. Tidak hanya itu, pelibatan pedagang dalam musyawarah desa menjadi faktor penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Meski demikian, pelaksanaan pasar rakyat di desa menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan atau perbaikan pasar tidak diiringi dengan pemeliharaan berkelanjutan. Selain itu, pedagang sering menunjukkan resistensi terhadap relokasi atau aturan baru karena khawatir kehilangan pelanggan atau harus menanggung biaya tambahan. Koordinasi antar pihak pengelola, pemerintah desa, dan pedagang pun kerap kurang optimal sehingga implementasi kebijakan berjalan lambat. Di sisi lain, banyak pasar desa belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga daya saingnya lemah dibanding pasar modern atau ritel besar. Selain itu, fasilitas yang terbatas, pengelolaan yang kurang efektif, serta menurunnya minat pembeli akibat munculnya pasar modern dan digital.¹⁵

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi solusi yang tepat. Pertama, pembiayaan pasar rakyat sebaiknya menggunakan model campuran, yakni memadukan dana desa, APBD, CSR, maupun kontribusi BUMDes untuk menjamin keberlanjutan operasional. Kedua, pendekatan partisipatif sangat penting, di mana pedagang dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar mereka merasa memiliki dan mendukung kebijakan. Ketiga, program pembinaan pedagang perlu digencarkan, misalnya pelatihan manajemen usaha sederhana, teknik menjaga kualitas produk segar, dan literasi digital agar pedagang dapat memperluas pasar melalui platform online.¹⁶

¹³ Wijaya, F., & Suryani, N., "Tantangan dan Peluang Pasar Rakyat di Era Digital," *Jurnal Ekonomi dan Teknologi* 19, no. 2 (2023): 130-145.

¹⁴ Sangaji, R. C., Muafi, & Priyono, A., *Revitalisasi Pasar Tradisional: Membangun Ketahanan Organisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan* (2025).

¹⁵ Dayuninggar, N. K., "Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Pasar Rakyat," Universitas Diponegoro (2024).

¹⁶ Baso, S., & Arafat, A., "Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Kolaka Timur," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* (2024).

Pasar rakyat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung demokrasi ekonomi karena keberadaannya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi yang inklusif. Sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi, pasar rakyat memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha kecil seperti petani, pedagang kecil, dan produsen lokal untuk memasarkan produk mereka secara langsung, sehingga meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pasar rakyat juga menjadi ruang publik yang mendukung pelestarian budaya lokal dan kearifan tradisional, menjadikannya lebih dari sekadar tempat transaksi ekonomi.¹⁷ Dengan memastikan bahwa pasar rakyat tetap nyaman, bersih, dan mudah diakses oleh masyarakat, pemerintah memberikan keberpihakan kepada kelompok ekonomi kecil dan menengah. Fungsi pasar rakyat sebagai penggerak ekonomi lokal dan wadah distribusi barang yang terjangkau memperkuat demokrasi ekonomi, karena memungkinkan terciptanya keadilan ekonomi yang merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pasar rakyat tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga simbol pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasar rakyat, seperti Pasar Manis di Purwokerto Barat, memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi ekonomi. Dalam konteks demokrasi ekonomi, pasar rakyat adalah wadah bagi terciptanya kesetaraan kesempatan ekonomi bagi masyarakat dari berbagai kalangan, terutama pedagang kecil dan menengah. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para pedagang Pasar Manis menunjukkan bahwa pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong, di mana pelaku usaha mikro dapat bersaing secara adil tanpa dominasi oleh pemain besar. Melalui observasi, terlihat bahwa pasar ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi karena memberikan ruang bagi berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Ibu Rosida salah satu pedagang buah di Pasar Manis mengatakan “Harga buah ditentukan sendiri sama pedagang, kita para pedagang paling ambil keuntungan Rp2.000,- sampai Rp5.000,- aja, paling nanti cuma ngasih uang sewa aja ke orang kantor, biasanya sehari itu boleh Rp4.500,-”. Dalam argumen yang dinyatakan oleh Ibu Rosida para pedagang diberikan hak penuh dalam menentukan harga dagang barang yang dijual kepada para pembeli, orang kantor yang dimaksud oleh Ibu Rosida adalah staff dari Pasar Manis yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengelola kebersihan Pasar Manis Purwokerto Barat, yang kemudian Ibu Rosida melanjutkan argumennya dengan mengatakan “Kalau dulu gak ada uang sewa, tapi sekarang ada uang sewa kalo gak bayar sampe 6 bulan nanti lapaknya ditutup.”. Peraturan yang ditetapkan oleh staff Pasar Manis untuk para pedagang Pasar Manis, yaitu ketika uang sewa tidak dibayar selama 6 bulan lamanya, maka lapak akan ditutup. Menurut Ibu Rosida hal ini sudah terkadang membuatnya keberatan namun beliau juga merasa hal itu sudah wajar ketika diadakannya uang sewa. Beliau juga mengatakan “Tahun ini emang lagi sepi-sepinya, jarang sekali pembeli. Kadang kalau gak habis saya jual di harga murah buat pedagang jus yang lagi cari buah murah.”

¹⁷ Subroto, T. W., "Implementasi dan Strategi Pengembangan Pengelolaan Pasar Rakyat," Universitas Abdurachman Saleh (2023).

Dalam argumennya yang dinyatakan Ibu Rosida ketika jualannya tidak laku maka beliau menyiasati untuk diolah menjadi jus buah, selain itu juga akan dijual murah bagi penjual jus buah yang sedang mencari buah dengan harga yang rendah. Adapun menurut narasumber lain yang bernama Ibu Lasem salah satu pedagang sayur di Pasar Manis mengatakan “Harga jualnya saya tentukan sendiri, paling saya menyesuaikan harga dari pemasok atau harga ketika saya beli. Biasanya saya paling ambil keuntungan sekitar Rp1.500,- sampai Rp2.000,- aja”. Beliau juga menambahkan dalam argumennya, “Pasar Manis menurut saya itu pasar paling rapih di Purwokerto, karena tata letaknya sudah sangat rapih”. Sesuai argumen yang dinyatakan Ibu Lasem Pasar Manis merupakan Pasar yang masuk kategori pasar rapih se-Purwokerto karena tatanan yang memblok-blok jenisnya, hal ini akan mempermudah pembeli saat berbelanja.

Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pedagang di Pasar Manis. Para pedagang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan program pelatihan seperti sekolah pasar atau penyuluhan mengenai tata cara pengelolaan pasar. Mereka hanya pernah menerima sosialisasi dari staf Dinas Perdagangan yang mengawasi Pasar Manis. Sosialisasi tersebut mengenai penggunaan metode pembayaran melalui QRIS. Para pedagang disarankan untuk mulai menambahkan metode pembayaran menggunakan QRIS, mengingat pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Dalam sosialisasi tersebut, para pedagang juga diperkenalkan dengan cara pembuatan kode QRIS. Dinas Perdagangan sebagian besar pedagang menolak dengan halus untuk menggunakan metode pembayaran QRIS, mengingat usia mereka yang tidak lagi muda dan ketidakmampuan dalam teknologi (gaptek), sehingga merasa kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sebagai hasilnya, para pedagang di Pasar Manis tetap memilih untuk menerima pembayaran secara tunai. Menanggapi hal ini, staff Pasar Manis tidak memaksa para pedagang untuk menggunakan QRIS dan memahami kondisi tersebut. Para pedagangpun merasa dihargai dan senang karena dimengerti.

Dinas Perdagangan Purwokerto Barat memberikan kebijakan yang adil dan fleksibel bagi para pedagang di Pasar Manis. Kebijakan ini mencakup kebebasan menentukan harga dagangan, sosialisasi harga pasar, serta pengelolaan fasilitas dan kebersihan pasar melalui uang sewa lapak. Kebijakan penutupan lapak jika tidak membayar sewa memberikan perlindungan terhadap pedagang dan menjaga keberlanjutan usaha. Dengan pendekatan ini, staff Pasar Manis mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan di Pasar Manis secara inklusif dan berkelanjutan.

5. Evaluasi Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam pengelolaan Pasar Rakyat

Pasar rakyat (pasar tradisional/desa) berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal, penyedia lapangan kerja, dan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Pengelolaan pasar yang adil dan inklusif memastikan akses yang setara bagi pedagang kecil (termasuk perempuan, kelompok rentan), menjaga keteraturan ruang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan lokal¹⁸. Studi empiris menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (pedagang, Koperasi, BUMDes, RT/RW) menentukan efektivitas pengelolaan pasar. Peran Pemerintah (daerah) fungsi utama untuk menciptakan keadilan dan inklusi: (a) Regulasi & Kebijakan: Pemerintah daerah menetapkan Perda/peraturan operasional tentang pengelolaan pasar (retribusi, tata letak, jam operasi, zonasi pedagang).

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk memastikan regulasi tidak diskriminatif terhadap pedagang kecil. (b) Fasilitasi Infrastruktur: Penyediaan sarana (lapak yang layak, sanitasi, akses jalan, kios permanen) dan fasilitas keamanan/penertiban yang adil. Kekurangan fasilitas sering menjadi akar masalah ketidakadilan (pedagang terpaksa jual di trotoar). (c) Pembinaan & Pendampingan: Pelatihan manajemen usaha, literasi

keuangan, digitalisasi (pemasaran online), serta program subsidi/insentif bagi pedagang rentan untuk meningkatkan daya saing. (d) Pengawasan & Penegakan: Menegakkan aturan zonasi dan retribusi secara transparan serta mencegah praktik nepotisme atau pemungutan liar yang merugikan pedagang kecil¹⁹. Selanjutnya, Peran Masyarakat (pedagang, pengelola, komunitas) aspek partisipasi dan penjaminan inklusi: (a) Partisipasi dalam Perencanaan: Keterlibatan pedagang dan perwakilan masyarakat (musyawarah pasar, koperasi, BUMDes) dalam perancangan tata ruang, jadwal, dan aturan pasar menjamin suara kelompok rentan terdengar. (b) Pengelolaan Mandiri & Kelembagaan Lokal: Pembentukan kelembagaan seperti koperasi pedagang atau unit pengelola berbasis komunitas memperkuat governance pasar dan transparansi pengelolaan retribusi. (c) Kesadaran Kolektif & Etika Dagang: Kepedulian bersama menjaga kebersihan, aturan parkir, dan saling menghormati slot dagang membantu menciptakan lingkungan usaha yang adil. Program penyuluhan lingkungan pasar juga terbukti efektif.²⁰

¹⁸ Rahardjo, S., *Ekonomi Kerakyatan dan Pasar Tradisional di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

¹⁹ Rohman, A., *Pasar Tradisional sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²⁰ Kementerian Perdagangan RI, *Revitalisasi Pasar Rakyat: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2015).



KESIMPULAN

Pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan sekaligus wujud nyata implementasi demokrasi ekonomi di tingkat lokal. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, budaya, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar rakyat mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi melalui partisipasi aktif masyarakat, keterlibatan pedagang dalam pengambilan keputusan, serta distribusi ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, persaingan dengan pasar modern, keterbatasan modal, hingga rendahnya literasi digital pedagang, pasar rakyat tetap berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, serta menjaga identitas budaya lokal. Dukungan pemerintah, pengelola, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi kendala tersebut melalui revitalisasi, pembinaan pedagang, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan pengelolaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, pasar rakyat berpotensi besar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang mandiri, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, S. & Arafat, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Kolaka Timur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Dayuninggar, N.K. (2024). Analisis implementasi kebijakan pembinaan pasar rakyat. Universitas Diponegoro.
- Fariz, T. A., Nugraha, G., AlFauzan, M. R., & Sumaryono, D. M. (2023). Demokrasi Pancasila Dalam Isu Ekonomi *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 737- 742.
- Kementerian Perdagangan RI. (2015). *Revitalisasi Pasar Rakyat: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- Kusuma, I. W., & Lestari, S. (2022). Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 15(1), 50-65.
- Maharani, Rieska, dkk. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Beserta Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Pangan Melalui Kampung Hidroponik Di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Lokal*. Surabaya: CV. AA. RIZKY
- Putri, R. A., & Wibowo, A. (2019). Pengaruh Pasar Tradisional terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 21(1), 75-88.
- Rahardjo, S. (2020). *Ekonomi Kerakyatan dan Pasar Tradisional di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rohman, A. (2020). *Pasar Tradisional sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Deepublish. E-book.
- Sangaji, R. C., Muafi, & Priyono, A. (2025). *Revitalisasi pasar tradisional: Membangun*

ketahanan organisasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Sari, D. P., & Nugroho, Y. (2020). Peran Pasar Rakyat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 145-160.

Savanna Fransisca S. Manuel. (2024). Penerapan konsep dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Pasar Desa Cipeundeuy. *Jurnal PGs Undip*.

Seff, S. M. (2010). Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. *Risalah Hukum*, 13-25.

Subroto, T.W. (2023). Implementasi dan strategi pengembangan pengelolaan pasar rakyat. Universitas Abdurachman Saleh.

Sudrajat, D. W., Nurwanda, A., & Budiawan, A. (2024). Implementasi Peraturan Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kabupaten Ciamis. *Jurnal OTONOMI*, 1(2), 313-324.

Syafruddin Karimi, S. E. (2010). Manifesto Demokrasi Ekonomi: Sistem Pasar dan Keadilan Sosial.

Wijaya, F., & Suryani, N. (2023). Tantangan dan Peluang Pasar Rakyat di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, 19(2), 130-145.

